

# Peran Audit Internal Berbasis Risiko dalam Pencegahan Kecurangan Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Rafi Naufal Arivia<sup>1\*</sup>, Eka Wirajuang Daurrohmah<sup>2</sup>  
Department of accounting, Faculty of Economic and Business,  
Universitas Terbuka, INDONESIA<sup>1,2</sup>  
Email: [053159105@ecampus.ut.ac.id](mailto:053159105@ecampus.ut.ac.id)\*

**Abstract:** - Audit Internal Berbasis Risiko merupakan pendekatan audit modern yang berfokus pada manajemen risiko dan penguatan tata kelola organisasi. Pengaruh yang signifikan dan efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, terutama pada lembaga dengan sistem manajemen risiko yang telah diimplementasikan dengan matang. Namun di sektor publik penerapan RBIA masih menghadapi tantangan seperti budaya risiko yang lemah, kompetensi auditor yang terbatas dan dukungan pengendalian internal yang tidak memadai. Penelitian yang dilakukan ini untuk mencoba menganalisis peran RBIA dalam pencegahan kecurangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mengidentifikasi tantangan serta strategi dalam penerapannya. Pendekatan metode kualitatif menjadi metode yang dipilih oleh peneliti melalui wawancara dan analisis dokumen penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan RBIA di BNPB berkontribusi dalam meningkatkan pendeteksian dini dan pencegahan kecurangan meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan serta terintegrasi dengan sistem manajemen risiko lembaga tersebut. Harapannya temuan ini dapat memperluas pemahaman tentang praktik RBIA di sektor publik Indonesia dan menjadi acuan untuk meningkatkan kekuatan fungsi audit internal di lembaga pemerintah.

**Key-Words:** - Audit Internal; Manajemen Risiko; Pencegahan Kecurangan; Audit.

**Received:** Oct 10, 2025. **Revised:** Oct 27, 2025. **Accepted:** Nov 08, 2025. **Published:** Des 30, 2025.

## 1 Introduction

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menyebabkan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Sektor lainnya perlu mengimplementasikan manajemen risiko di organisasi masing-masing. Hal ini ditujukan menjalankan rencana pembangunan nasional yang perlu penyelenggaraan manajemen risiko terintegrasi, baik di dalam maupun lintas kementerian/Lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya. BNPB selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas untuk menanggulangi bencana pun perlu untuk menerapkan manajemen risiko organisasinya tanpa mengesampingkan manajemen risiko kebencanaan yang perlu disusun sebagai bentuk mitigasi bencana. Oleh karena itu, perlu adanya pergeseran kerangka berpikir untuk menyikapi kebijakan penerapan manajemen risiko ini.

Selain pelaksanaan operasionalnya tahap pengawasan pun perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan risiko yang telah disusun oleh manajemen. Salah satunya metode audit internal berbasis risiko (*Risk-Based Internal Audit*) telah menjadi pendekatan audit modern yang diakui secara luas dalam mendukung tata kelola organisasi dan efektivitas pengendalian risiko. Berdasarkan Standar Audit Internal Global yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Audit* (IIA, 2024) menjelaskan bahwa tujuan audit internal memperkuat kemampuan organisasi untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan jaminan, saran, wawasan, dan pandangan ke depan, yang

independen, berbasis risiko, dan obyektif kepada dewan dan manajemen. Pendekatan ini menempatkan risiko sebagai dasar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, sehingga auditor tidak hanya berfokus pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada area yang memiliki potensi risiko tertinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Melalui pelaksanaan audit internal berbasis risiko, fungsi audit internal diharapkan tidak sekadar menjadi alat deteksi penyimpangan, melainkan berperan strategis dalam memberikan keyakinan dan konsultasi bagi manajemen untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan pencegahan kecurangan (*fraud prevention*). Menurut (Astuti & Riyanti, 2025) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan audit internal berbasis risiko dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan memperhatikan potensi risiko yang akan terjadi. Selain itu (Wahyuni, Ridwan Isnaini & Hilmi Nurul, 2025) menjelaskan bahwa audit berbasis risiko berperan penting dalam memperbaiki kelemahan pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan tata kelola keuangan yang transparan.

Berdasarkan Dr. Donald Cressey yang berperan sebagai seorang kriminolog dan diangkat pada jurnal yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* menjelaskan bahwa seseorang melakukan penipuan dikenal sebagai *fraud triangle* atau segitiga penipuan yang mana segitiga tersebut berisikan beberapa faktor yang saling berkaitan, misalnya tekanan keuangan, peluang dan rasionalisasi. Tekanan keuangan ini mencakup individu yang memiliki motivasi untuk berbuat curang dikarenakan kondisi keuangan yang sedang tidak baik-baik saja seperti kebutuhan hidup yang meningkat, utang menumpuk dan penghasilan tidak cukup serta lainnya. Kemudian peluang ini termasuk pada celah atau ruang untuk memberikan kemungkinan yang buruk bagi seseorang untuk memanfaatkan hal tersebut kepada kecurangan. Besar peran peluang dalam keterjadiannya sebuah kecurangan karena merasa tindakannya tidak mudah terdeteksi atau punya cara untuk mengelabui. Selanjutnya rasionalisasi termasuk dalam peranan penting terjadinya suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya akan memberikan banyak alasan untuk membenarkan perbuatannya dengan tujuan agar tindakannya dapat dimaklumi. Ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lain yang dapat saling menjelaskan bagaimana prosesnya mulai awal sampai dengan individu tersebut berani melakukan tindakan kecurangan.

Seiring berjalannya waktu teori mengenai kecurangan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan organisasi dan semakin banyaknya variabel akibatnya menjadi banyak bentuk penyimpangan yang terjadi. Pada tahun 2019 Vourias memperkenalkan konsep *Fraud Hexagon* sebagai pengembangan dari teori sebelumnya yang pada dasarnya tidak mengubah inti pemikiran awal tetapi menambahkan tiga elemen baru yang dinilai relevan dengan kondisi saat ini, yaitu kemampuan, arogansi dan kolusi. Kemampuan yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa kecurangan tidak semata-mata muncul karena niat atau tekanan melainkan juga dipengaruhi oleh keahlian, pengetahuan serta posisi yang dimilikinya. Dengan bekal tersebut individu mampu memahami sistem, mengenali celah dalam pengendalian lalu memanfaatkannya untuk meraih keuntungan pribadi secara maksimal. Berbeda dengan kemampuan arogansi lebih berkaitan dengan sikap mental individu yang merasa dirinya lebih unggul, memiliki kekuasaan atau berada di atas aturan. Perasaan ini mendorong munculnya keberanian untuk melakukan kecurangan karena adanya keyakinan bahwa perbuatannya tidak akan terungkap atau tidak akan berujung pada sanksi. Sementara itu kolusi mencerminkan adanya kerja sama tersembunyi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan yang tidak semestinya, yang pada akhirnya dapat melemahkan pengendalian internal karena para pelaku saling melindungi dan menutupi tindakan masing-masing. Seiring berkembangnya teori *fraud* yang menunjukkan bahwa kecurangan dapat dipicu oleh beragam faktor dan risiko tersebut tetap dapat ditekan melalui penerapan manajemen risiko yang baik dengan penguatan pengendalian internal serta pelaksanaan audit internal berbasis risiko yang dilakukan secara konsisten dan efektif.

Penerapan audit internal berbasis risiko yang berhasil umumnya lebih banyak ditemukan di sektor swasta atau pada lembaga yang telah memiliki sistem manajemen risiko yang matang. Hal ini tercermin dalam penelitian Safitri Suci Aulia (2022) yang menunjukkan bahwa audit internal berbasis risiko belum diterapkan secara menyeluruh pada PTKIN di

Indonesia. Temuan tersebut menggambarkan bahwa sebagian lembaga sektor publik masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan audit internal berbasis risiko terutama karena tingkat kematangan sistem manajemen risiko yang belum memadai. Kondisi ini sejalan dengan teori dasar audit internal berbasis risiko yang menekankan bahwa efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan organisasi dalam mengelola risiko secara sistematis dan terstruktur. Kompetensi auditor dan dukungan manajemen juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan penerapan audit internal berbasis risiko. Kurniawan Taufik, Bukit Rina dan Erwin Keulana (2023) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap strategi audit internal berbasis risiko dapat ditingkatkan melalui pelatihan profesional berkelanjutan bagi auditor yang didukung oleh dedikasi manajemen senior serta pengakuan terhadap peran strategis audit internal. Audit internal berbasis risiko tidak sekadar dipahami sebagai metode pemeriksaan melainkan sebagai cerminan tingkat kematangan manajemen risiko organisasi secara keseluruhan serta kompetensi sumber daya manusianya. Tanpa fondasi manajemen risiko dan kompetensi yang kuat pelaksanaan audit internal berbasis risiko berpotensi tidak berjalan optimal karena auditor akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi, mengukur dan memprioritaskan risiko secara sistematis. Dalam praktiknya penerapan audit internal berbasis risiko menuntut adanya sinergi yang erat antara fungsi audit internal dan sistem manajemen risiko organisasi.

Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti apabila dihubungkan antara teori yang ada dengan praktek secara langsung di sektor publik khususnya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berperan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki besar sekali tanggung jawab dalam penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia BNPB beroperasi dalam lingkungan yang sangat dinamis, kompleks dan dituntut harus fleksibel yang mengatasnamakan keselamatan masyarakat ketika penanggulangan bencana pasti tidak jauh dari sebuah risiko. Tahun 2024 BNPB telah menerbitkan kebijakan atau regulasi terkait pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan BNPB yang bertujuan untuk melindungi tujuan organisasi dari segala potensi yang akan menghambat tujuan tersebut. BNPB telah memiliki payung hukum atas pelaksanaan manajemen risiko tetapi faktanya BNPB belum melakukan implementasi secara keseluruhan terhadap peraturan tersebut dan kurangnya kesadaran akan risiko di setiap kegiatannya itu dapat mengancam tujuannya sehingga perlu dikelola lebih mendalam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Melihat kondisi tersebut melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BNPB telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip audit internal berbasis risiko dalam kegiatan pengawasannya. Upaya ini dilakukan sebagai langkah adaptif dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan di tengah keterbatasan implementasi sistem manajemen risiko formal. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara teori yang ideal yang mengharuskan adanya struktur manajemen risiko dengan tingkat kedewasaan yang cukup dengan praktik implementasi di BNPB yang masih berada dalam tahap penguatan dasar terkait risiko dan budaya pengawasannya.

Kesenjangan yang ada membuka peluang untuk melakukan penelitian yang penting, karena menunjukkan bahwa penerapan audit intern berbasis risiko di lembaga pemerintah seperti BNPB tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan sektor swasta. Di satu sisi auditor internal diminta untuk menggunakan pendekatan berbasis risiko tetapi di sisi lain mereka menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan data risiko, ketidakselarasan sistem dan kurangnya kesadaran akan risiko di tingkat manajemen. Hal ini menimbulkan pertanyaan empiris: bagaimana RBIA dijalankan dalam konteks organisasi yang belum memiliki sistem manajemen risiko terstruktur? Sejauh mana auditor internal dapat menjalankan prinsip RBIA secara efektif untuk mencegah kecurangan di tengah kondisi tersebut ?

Latar belakang penelitian ini yang menjadi dasar untuk mengangkat judul "Peran Audit Internal Berbasis Risiko dalam Pencegahan Kecurangan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)". Penelitian yang dilakukan ini mencoba menjawab secara mendalam bagaimana RBIA diimplementasikan oleh auditor internal BNPB dalam upaya pencegahan kecurangan sekaligus mengidentifikasi tantangan dan strategi yang mereka lakukan dalam mengadaptasi prinsip RBIA di lingkungan yang belum memiliki

sistem manajemen risiko matang. Pendekatan kualitatif harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris terhadap literatur audit sektor publik dan memberikan masukan praktis bagi penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah dalam mendorong tata kelola dan integritas lembaga negara.

## 2 Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran audit internal berbasis risiko dalam upaya pencegahan kecurangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan kontekstual mengenai bagaimana audit internal berbasis risiko diterapkan dalam kondisi nyata khususnya pada organisasi sektor publik yang sistem manajemen risikonya belum sepenuhnya terstruktur. Studi kasus tunggal dilakukan di Inspektorat Utama BNPB dengan fokus pada cara auditor internal menerapkan prinsip *Risk Based Internal Audit* (RBIA) berbagai hambatan yang dihadapi serta strategi yang digunakan untuk mendukung pencegahan kecurangan di lingkungan instansi tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi langsung. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pejabat pengawasan dan auditor internal untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan RBIA serta praktik pencegahan kecurangan di BNPB. Telaah dokumen mencakup analisis terhadap kebijakan, regulasi dan pedoman audit internal serta dokumen pengawasan lain yang relevan yang digunakan untuk memverifikasi dan memperkuat temuan dari hasil wawancara. Observasi langsung dilakukan terhadap proses audit dan aktivitas pengawasan di lapangan guna melihat secara nyata bagaimana prinsip RBIA diterapkan dan diintegrasikan dalam kegiatan pengawasan sehari-hari.

## 3 Results and Discussions

Hasil penelitian cukup meyakinkan dengan menunjukkan bahwa penerapan audit internal berbasis risiko dalam upaya pencegahan kecurangan di BNPB masih berada pada tahap transisi yaitu dari pola pengawasan tradisional menuju metode yang lebih sistematis dan selaras serta modern dengan prinsip manajemen risiko. Walaupun BNPB telah memiliki kebijakan terkait manajemen risiko yang baru diterbitkan pada tahun 2024 implementasinya saat ini belum dilakukan secara menyeluruh dan optimal. Aturan tersebut sebenarnya sudah memberikan landasan dasar bagi penerapan manajemen risiko namun pelaksanaannya masih berada pada tahap awal. Proses identifikasi penilaian hingga mitigasi risiko belum berjalan secara komprehensif di seluruh unit kerja. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas audit internal berbasis risiko dikarenakan faktanya bahwa *Risk-Based Internal Audit* (RBIA) mempunyai syarat dan ketentuan pada praktik implementasi manajemen risiko yang matang sebagai dasar utama.

Penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa BNPB meraih tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level 3 atau "terdefinisi". Level ini menggambarkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang dimiliki oleh BNPB telah terdokumentasi, terstruktur dan mulai diterapkan secara konsisten termasuk unsur penilaian risiko. Adanya hasil penilaian maturitas SPIP ini tidak langsung menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko organisasi juga telah matang. Maksudnya adalah keberadaan elemen penilaian risiko dalam SPIP belum dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa keseluruhan proses manajemen risiko BNPB sudah berjalan optimal. Proses audit internal berbasis risiko membutuhkan informasi risiko yang lengkap, valid dan menyeluruh untuk dapat menyusun prioritas audit secara tepat. Jika manajemen risiko belum matang maturitasnya audit berbasis risiko berpotensi hanya menjadi formalitas tidak memberikan nilai tambah kepada organisasi dengan penentuan objek audit berbasis parameter administratif bukan pada risiko strategis, reputasi dan operasional yang sebenarnya. Hal ini ditunjukkan melalui Surat Keputusan Inspektur Utama BNPB Tahun 2023 yang dimiliki

dengan isi keputusan tersebut mencakup petunjuk pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. Regulasi ini mengatur tentang bagaimana perencanaan pengawasan itu dibuat sehingga dapat menjadi acuan atau pedoman bagi auditor dalam merencanakan program pengawasan tahun berikutnya dengan basis risiko yang disusun mulai dari beberapa faktor risiko yang telah ditetapkan.

Peneliti dapat meyakinkan bahwa BNPB telah mulai menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko dari perencanaan sampai dengan pelaporan tetapi penerapannya masih terbatas pada sejumlah indikator risiko yang bersifat administratif maupun operasional. Faktor-faktor yang digunakan antara lain besaran pagu anggaran, nilai pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan, saldo tindak lanjut temuan APIP dan BPK, capaian nilai AKIP, periode terakhir diaudit, hasil survei kepuasan masyarakat dan risiko pengaduan serta keberadaan perangkat pengendalian. Penyusunan Prioritas Pengawasan dapat melalui indikator tersebut namun penggunaannya belum mencerminkan praktik audit internal berbasis risiko yang ideal sesuai pedoman yang diterbitkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA). Menurut IIA audit berbasis risiko harus berdasarkan pada *risk universe* atau kelompok risiko organisasi yang tersusun dari proses manajemen risiko yang sistematis mencakup risiko strategis, operasional, keuangan, teknologi informasi dan kepatuhan. Faktanya hal ini disebabkan karena penerapan manajemen risiko di BNPB masih pada tahap sosialisasi dan belum diimplementasikan secara penuh pada praktik manajemen risikonya. Praktik audit internal berbasis risiko saat ini lebih menyerupai penilaian risiko berbasis parameter operasional bukan perencanaan audit yang digerakkan oleh risiko sebagaimana standar internasional.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kematangan manajemen risiko memiliki hubungan erat dengan efektivitas audit internal berbasis risiko terutama dalam konteks pencegahan kecurangan. Tanpa manajemen risiko yang kuat BNPB belum mampu secara optimal untuk mengidentifikasi risiko kecurangan secara proaktif di seluruh proses dan pengelolaan anggarannya. Audit internal berbasis risiko yang matang seharusnya mampu memusatkan perhatian pada area dengan kerentanan kecurangan yang tinggi seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah, belanja darurat dan aktivitas lain yang memiliki kompleksitas pengendalian tinggi. Implementasi manajemen risiko belum menjadi budaya organisasi pemetaan risiko kecurangan belum optimal sehingga fungsi pengawasan internal belum dapat menjalankan peran pencegahannya secara maksimal.

Tata kelola organisasi sektor publik audit internal berbasis risiko berakar pada prinsip *Three Lines Model* yang diterbitkan oleh IIA. Model ini menyatakan secara jelas bahwa efektivitas pengawasan internal sangat ditentukan oleh koordinasi antara lini pertama yang menjalankan operasional, lini kedua yang mengelola risiko dan kepatuhan dan lini ketiga yang menjalankan audit internal. Audit internal berbasis risiko berada pada lini ketiga sehingga pelaksanaannya bergantung pada kekuatan informasi risiko dari lini pertama dan kedua. Ketika proses manajemen risiko belum berjalan menyeluruh seperti di BNPB auditor internal sulit menjalankan perannya secara maksimal. Kondisi ini sejalan dengan teori *risk maturity* yang menegaskan bahwa efektivitas audit internal berbasis risiko hanya dapat tercapai sesuai dengan teori idealnya apabila organisasi berada pada tingkat kematangan risiko yang cukup yaitu ketika pelaksanaan manajemen risiko telah terintegrasi dalam pengambilan keputusan dari tingkat manajemen.

Selanjutnya sudut pandang terhadap teori manajemen risiko kerangka kerja yang disampaikan pada standar ISO 31000 yang mana menekankan pentingnya pendekatan yang sistematis mulai dari penetapan konteks, identifikasi, analisis dan evaluasi hingga mitigasi risiko. Pelaksanaan yang tidak konsisten menjadi salah satu tahapan yang akan menciptakan kesenjangan informasi yang berdampak secara langsung pada kualitas audit berbasis risiko. Kondisi tersebut dapat menunjukkan auditor internal tidak dapat menggunakan profil risiko yang relevan dan andal sehingga perencanaan audit menjadi berfokus pada aspek administratif bukan area strategis berisiko tinggi atau strategis bagi organisasi. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan pengambilan keputusan berbasis risiko yang menempatkan risiko sebagai faktor dasar dan utama dalam menentukan suatu prioritas pengawasan untuk menjaga tujuan organisasi khususnya pencegahan kecurangan/*fraud*.

Konsep kecurangan seperti *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond* memberikan

pengertian dasar bahwa kecurangan muncul karena tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan pelaku. Begitu juga BNPB yang mana area seperti pengadaan darurat, pemberian bantuan dan distribusi logistik memiliki tingkat kesempatan tinggi untuk terjadinya *fraud*. Audit berbasis risiko yang matang seharusnya mampu menyoroti area tersebut. Tanpa sistem manajemen risiko yang kuat identifikasi area rawan *fraud* menjadi terbatas sehingga peran pengawasan internal yang dirasakan kurang kuat dan tidak dapat melindungi organisasi.

Selain itu kerangka *risk governance* juga menyatakan secara jelas bahwa organisasi harus memastikan relevansi dan integrasi yang cukup antara beberapa elemen terdiri dari struktur organisasi, proses manajemen risiko, budaya risiko dan mekanisme pengendalian. Ketika salah satu elemen ini lemah mengakibatkan terjadinya kekosongan pengendalian yang dapat meningkatkan risiko kecurangan. Keberhasilan dari pelaksanaan audit internal berbasis risiko sangat tergantung pada efektivitas *risk governance* yang dibangun organisasi mulai dari komitmen pimpinan dan partisipasi seluruh unit serta konsistensi dalam penerapan prosedur risiko menjadi kunci utama agar pengawasan berbasis risiko dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pencegah kecurangan. Audit internal berbasis risiko juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip *good governance* dan kerangka SPIP. Meskipun SPIP memberikan dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan komponen pengendalian internal dan implementasinya juga sering sekali masih bersifat administratif. Sebaliknya pengawasan berbasis risiko mengutamakan pendekatan strategis berbasis risiko yang memerlukan kedalaman analisis dan informasi risiko yang lebih dinamis. Perlunya harmonisasi antara SPIP sebagai standar nasional dan IIA sebagai standar internasional menjadi penting agar pengawasan internal BNPB tidak hanya patuh regulasi tetapi juga tanggap terhadap risiko aktual yang dihadapi organisasi.

Efektivitas audit internal berbasis risiko sangat dipengaruhi oleh kapabilitas APIP yang melaksanakannya. Model kapabilitas APIP menunjukkan bahwa audit berbasis risiko menuntut kemampuan analitis dan pemahaman mendalam mengenai risiko operasional serta kapasitas konsultatif yang tinggi. Adanya tantangan seperti kurangnya auditor, keterbatasan kompetensi teknis dan belum kuatnya budaya risiko menjadi faktor yang membatasi kedalaman analisis audit internal berbasis risiko di BNPB. Kompleksitas kegiatan penanggulangan bencana yang tinggi mengakibatkan BNPB membutuhkan auditor internal dengan kapabilitas yang lebih baik dalam memahami risiko yang ada di lapangan maupun risiko keuangan yang melekat. Karakteristik BNPB yang berada di lingkungan risiko tinggi menjadikan organisasi ini membutuhkan metode audit intern berbasis risiko yang lebih adaptif. Risiko yang dihadapi BNPB tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup risiko strategis, reputasi dan kolaborasi lintas sektor serta risiko operasional pada situasi darurat. Audit internal harus mampu merespons risiko yang bergerak cepat dan tidak terduga. Audit internal berbasis risiko di BNPB harus didukung oleh proses manajemen risiko yang matang dan telah terbentuk budaya sadar risiko yang aktif bukan hanya dokumentasi formal.

Penerapan audit internal berbasis risiko juga memerlukan pembangunan budaya risiko yang kuat. Budaya risiko menentukan sejauh mana pegawai secara sadar memahami dan memberikan respons atas risiko dalam pekerjaannya. Implementasi manajemen risiko hanya menjadi formalitas dan informasi risiko yang dihasilkan tidak akurat jika budaya risiko tidak dibentuk sebelumnya. Perlunya menanamkan nilai-nilai yang mendorong pelaporan risiko, keterbukaan dan kepatuhan pada pengendalian internal agar audit internal berbasis risiko dapat memperoleh data dan informasi risiko yang berkualitas serta memberikan nilai tambah yang lebih terasa signifikan bagi manajemen. Audit internal berbasis risiko memberikan keunggulan strategis yang disebabkan oleh kemampuan mengarahkan audit pada titik rawan *fraud* yang sifatnya *targeted* atas *red flag* yang telah ditemukan sebelumnya. Kejadian *fraud* sering kali terjadi pada tahap perencanaan, pengadaan, penyaluran hibah dan pertanggungjawaban anggaran. Kemudian audit internal berbasis risiko juga dapat membantu auditor internal mengidentifikasi pola yang sering terjadi atas risiko *fraud* melalui analisis data, evaluasi pengendalian dan perhatian khusus pada risiko inheren yang tinggi. Apabila diterapkan secara optimal audit internal berbasis risiko akan menjadi alat yang tidak hanya mendeteksi potensi *fraud* tetapi juga mengurangi celah-celah terjadinya

penyimpangan sejak dini.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan audit internal berbasis risiko di BNPB dalam pencegahan kecurangan sudah mulai berkembang tetapi belum optimal karena belum didukung oleh sistem manajemen risiko organisasi yang matang. Adanya penguatan proses manajemen risiko, membangun budaya risiko, meningkatkan kapabilitas APIP dan mengintegrasikan audit internal berbasis risiko ini dengan pedoman IIA serta SPIP peran audit internal di BNPB berpotensi menjadi semakin signifikan dalam mendukung tata kelola yang bersih, efektif dan akuntabel.

## 4 Conclusions

Sangat penting untuk penerapan audit internal berbasis risiko di BNPB yang mana saat ini masih berada dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pencegahan kecurangan. Meskipun BNPB telah menerbitkan peraturan terkait manajemen risiko dan mencapai maturitas SPIP level 3 implementasi manajemen risiko belum berjalan menyeluruh sehingga belum mampu menjadi dasar yang kuat untuk melakukan audit internal berbasis risiko. Pengawasan yang dilakukan saat ini masih berfokus pada parameter operasional dan belum mencerminkan konsep audit berbasis risiko sebagaimana dianjurkan oleh IIA. Akibatnya peran audit internal dalam memetakan risiko kecurangan secara lengkap dan komprehensif belum optimal sehingga potensi pencegahan kecurangan belum dapat dilakukan dengan maksimal.

Hasil analisis cukup meyakinkan bahwa keberhasilan audit internal berbasis risiko sangat bergantung pada kematangan sistem manajemen risiko organisasi. Tanpa adanya proses manajemen risiko yang kuat, audit internal berbasis risiko hanya menjadi aktivitas administratif yang tidak sepenuhnya mencerminkan risiko strategis dan operasional yang sesungguhnya. Pelaksanaan audit internal berbasis ini dasarnya perlu sinergi lebih kuat antara fungsi pengawasan internal, unit pengelola risiko dan pimpinan organisasi agar pendekatan berbasis risiko dapat diintegrasikan secara menyeluruh. BNPB dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi dan meminimalkan peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan tugas kebencanaan.

Rekomendasi diberikan agar BNPB segera melakukan implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja secara optimal dan memastikan penerapannya berlangsung konsisten. BNPB juga perlu memperluas indikator risiko yang digunakan dalam penyusunan perencanaan audit agar mencakup risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan dan risiko *fraud* secara lebih menyeluruh dan mendalam. Fungsi audit internal juga perlu memperkuat kompetensi auditor dalam *Risk-Based Internal Audit* (RBIA) serta mengadopsi kerangka IIA secara lebih komprehensif. Harapannya audit internal berbasis risiko di BNPB diharapkan dapat berkembang lebih efektif dan berkontribusi signifikan dalam pencegahan kecurangan dan peningkatan akuntabilitas organisasi.

### References:

- Astuti, S., & Riyanti, A. (2025). Pengaruh Pelaksanaan Risk Based Internal Audit Terhadap Pencegahan Fraud. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Aulia, N., & Julian, L. (2024). Evaluasi Implementasi Risk Based Internal Audit (Studi Kasus pada PT ABC). *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Erika Pristiwati Anugraheni, E. S. (2022). Analysis of Risk Based Internal Audit Planning Implementation and Its Impact on Audit Quality: Case Study at The Inspectorate of Surakarta, Indonesia. *The Asian Institute of Research*.
- Jenius Romadoni, E. C. (2023). Implementation of The Risk Based Internal Audit, Auditor Competency, and Independence in The Detection of Fraud (Case Study at PT Jasa Raharja). *International Journal of Research and Review*.
- Kurniawati. (n.d.). PENDEKATAN AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO (RISK BASED INTERNAL AUDITING) UNTUK Mendukung Peranan Baru Audit Internal. *Jurnal Akuntansi Bisnis*.
- Kusdianti Fatimah, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan dan

- Pendeteksian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Mega Amalia Putri, N. O. (2024). Analysis of Factors and Fraud Preventive Efforts in Company Financial Reports: A Literature Review Study. *Asia Pacific Fraud Journal*.
- Nasruddin, N. A., Junaid, A., & Kalsum, U. (2021). Peranan Risk Based Internal Audit dan Perspektif Fraud Pentagon Terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. *Yume: Journal of Management*.
- Nuke Nugraha, H. Y. (2022). The Effect of Risk-Based Internal Audit Planning and Competence on Audit Quality with The Internal Auditor Paradigm as A Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi*.
- Risaldi, M. (2023). Peran Auditor Internal Dalam Upaya Pencegahan Fraud pada BMT Fauzan Azhima Kota ParePare. *IAIN Pare-Pare*.
- Safitri, S. A. (2022). IMPLEMENTASI AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO PADA PTKIN DI INDONESIA.
- Siregar, A., & Harahap, S. N. (n.d.). Penerapan Risk Based Internal Auditing: Studi Kasus pada Plan International Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Sofie Yunida Putri, A. A. (2021). Perkembangan Fraud Theory dan Relevansi dalam Realita. *Prosiding Senapan*.
- Syam, H., Wahyuni, N., & Fortuna, A. D. (2023). AUDIT BERBASIS RISIKO TERHADAP AKTIVITAS AUDIT INTERNAL DAN MANAGEMENT RISK RUMAH SAKIT DI MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Syarifah Hatijah, I. Y. (2021). Peran Audit Internal dalam Mencegah Fraud di Tengah Wabah COVID-19 (Studi Kasus Pada SPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya). *Jurnal Proaksi*.
- Tatang Suhidayat, F. R. (2024). The Implementation of Risk Based Audit on The Impact of Auditor Competence and Independence on Audit Quality in Bank Perekonomian Rakyat. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*.
- Taufik Kurniawan, R. B. (2023). The Factors Influencing the Risk Based Internal Audit in Improving the Effectiveness of Internal Audit. *International Journal of Social Science and Business*.
- Usman, J. (2018). Analisis Audit Intern Berbasis Risiko atas Pembiayaan Keuangan Pada PT Finance Multifinance di Makassar.
- Wahyuni, Isnaini, R., & Hilmi, N. (2025). PENGARUH AUDIT BERBASIS RISIKO TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH. *Neraca Manajemen*.
- Zunaedi, B. N., Annisa, H. R., & Dewi, M. (2022). FUNGSI INTERNAL AUDIT DAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR . *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.